



**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA BPKAD KOTA SORONG**

***THE INFLUENCE OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND
INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF
REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS
IN THE BPKAD OF SORONG CITY***

Maria Apriyane Patty

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial & Keguruan, Universitas Nani Bili Nusantara
Email : mariaapriyane90@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 20-08-2024

Revised : 24-08-2024

Accepted : 27-08-2024

Published: 29-08-2024

This research aims to test and analyze the influence of government accounting standards and internal control systems on the quality of regional government financial reports at the Sorong City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). This type of research is quantitative research using primary data. The data collection technique is by distributing questionnaires. The population in this research is all employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Sorong City. The sampling technique uses purposive sampling. The sample in this research is that the respondents are heads and staff members who work at the Sorong City BPKAD office who have work experience of at least 1 year. Data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS Statistics 25.0 For Windows software. The research results show that government accounting standards influence the quality of regional government financial reports, and the internal control system influences the quality of regional government financial reports.

Keywords : Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Financial Reports

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data adalah dengan melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu responden merupakan unsur kepala dan staf yang bekerja di kantor BPKAD Kota Sorong yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Data dianalisis menggunakan



regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS Statistics 25.0 For Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan akuntansi pemerintah telah terjadi sejak jaman Kerajaan Mesir Kuno dan kerajaan Mesopotamia (Mardiasmo 2006). Pada waktu itu digunakan sebagai pencatatan pajak dan dibuktikan dengan penemuan catatan akuntansi pada lempengan tanah. Dalam perkembangannya akuntansi bisnis berkembang lebih pesat dibanding akuntansi pemerintah. Indonesia termasuk negara yang tergolong lamban dalam perkembangan akuntansi pemerintah (Mardiasmo 2006). Perkembangan signifikan baru terjadi pada tahun 2000-an yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo 2006). Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Proses akuntansi atau tata keuangan saat ini telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Perkembangan dan perubahan akuntansi sebagai bagian dari proses sosial yang tidak bisa dipisahkan karena budaya suatu bangsa merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi dan perubahan akuntansi disuatu negara (Mardiasmo 2006).

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Sukmaningrum 2012). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah di haruskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Mahmudi 2011).



Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi *stakeholder* yang didapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Menurut (Suwarjono 2014) informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan (Sukmaningrum 2012).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap informasi ataupun nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait tingkat kewajaran dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah telah memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dearah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.



Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual sebagai masa transisi menuju akuntansi berbasis akrual penuh yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Pengendalian Intern (SPI). Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:35). Objek populasi dari penelitian ini adalah pegawai BPKAD Kota Sorong. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel atas dasar pertimbangan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:38). Metode pemilihan sampel adalah metode *convenience sampling*, dimana *convenience sampling* adalah prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti (Mudrajad Kuncoro, 2003:40).

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan metode pengumpulan datanya menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai BPKAD Kota Sorong.

Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan standar akuntansi pemerintahan, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern dan bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kuesioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta penjelasan tentang penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan



lengkap. Pengiriman kuesioner yang dilakukan dengan cara diantarkan secara langsung atau melalui *contact person* (perantara).

3. Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya terdiri dari sumber daya manusia (X_1), standar akuntansi pemerintah (X_2), dan sistem pengendalian intern.

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah :

- a. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya. Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti).
- b. Standar akuntansi pemerintah (X_1) dalam Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip – prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk membuat laporan keuangan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Indikator dalam penelitian ini adalah 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan Konsolidasi. Variabel standar akuntansi pemerintahan diukur pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti).
- c. Sistem pengendalian intern (X_2) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 4 indikator menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti).

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kota Sorong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



5. Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan **Uji Asumsi Klasik**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil statistik pada analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variable independensi (X1) $0,006 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, Dengan demikian standar akuntansi pemerintah (variabel X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (variabel Y).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil statistik pada analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variable independensi (X2) $0,008 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, Dengan demikian sistem pengendalian intern (variabel X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (variabel Y).



Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik (Mahaputra dan Putra, 2014). Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidak abasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sedangkan sistem pengendalian intern, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat system pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat..

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan.2023."*BPK Perwakilan Provinsi Daerah Papua Barat Serahkan LHP LKPD Pada Kabupaten/Kota Se-Papua Barat.*"
- Chandra, A.F.2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Skripsi.* Universitas Islam Indonesia.
- Desianawati, K., N.T, Herawati, dan N. K, Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2 No 1.
- Dunia, F. A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi.* Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19(Edisi Kelima).* Semarang: Universitas Diponegoro.



- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hutapea, T. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indriasari, D dan Ertambang, N. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Interen Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Pontianak
- Mahaputra, I P.U dan Putra,I.W. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8 (2): 230–244.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . 2006. “*Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace*.” *Jurnal* 2: 1–17.
- Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh,I. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan*.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.www.djpk.depkeu.go.id.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 *Tentang Standarisasi Nasional*. http://itjen.kemenperin.go.id/itjen/peraturan/PP_NO_102_2000.PDF. (diakses 15 Januari 2018).
- Rosalin, F. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Pada BLU di Kota Semarang*. *Skripsi*.Universitas Diponegoro.
- Sudiarianti, N.M. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Datya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pmerintah dan Satndar Akuntansi Pmerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Thesis*.Universitas Udayana.
- Sukmaningrum, T. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Skripsi*.Universitas Diponegoro.
- Suwarjono. 2014. *Teori Akuntansi*. Ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2009. *Pengaruh Sumber Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan*



Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. || Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto Vol 18 No 1